

**Keputusan Wali Kota  
No. 000.7.2/446/2025**

**Lampiran XII**



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

## **DINAS SOSIAL**



## WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 000.7.2/446/2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.

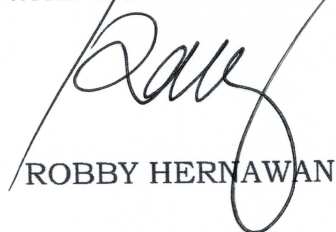
KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 04 NOV 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja PD sebagai persiapan penyusunan Renja PD. Penyusunan rancangan awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.

Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk merealisasikan tugas tersebut diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi uraian secara rinci mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Penyusunan rencana kerja diarahkan untuk mencapai Misi Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai" yang ditandai dengan terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi local yang berorientasi

pada ekonomi kerakyatan dan terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai. Program dan Kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan acuan kerja Pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026.
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renja ini adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra

##### Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Pada tahun 2024 Renja Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan. Dengan Total Anggaran Penetapan Dinas Sosial Kota Salatiga sebesar: Rp. 10.118488.429 dan berkurang di pergeseran menjadi 9.940.524.429, sedangkan anggaran perubahan sebesar 8.601.936.945 dengan serapan Anggaran hingga triwulan 3 Rp. 6.530.628.464 atau sebesar 75.92% capaian fisik 93%, pada anggaran perubahan setelah pergeseran sebesar 9.064.736.945. Tiap-tiap indikator program dapat tercapai dengan baik berbanding target capaian program, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

<b>Program</b> Indikator Program	Target	Realisasi
<b>IKD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS</li></ul>	94,5	94.56
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ul>	85	87,085
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas</li><li>Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment</li><li>Persentase PSKS yang dibina</li></ul>	45,3 34,61 70	100 100 100
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</li><li>Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</li><li>Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</li><li>Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar</li></ul>	100 100 100 100	100 100 100 100

<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi</li> </ul>	95	96,81
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</li> </ul>	100	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</li> </ul>	100	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		
Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100

Keberhasilan pencapaian target-target tersebut diatas ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terdapat intervensi pendanaan baik provinsi maupun pusat, serta penggunaan dana BTT Pemerintah Kota Salatiga
2. Dukungan SDM dalam pencapaian Indikator Program, termasuk dukungan dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Secara Periodik dilaksanakan *updating data*

Secara garis besar, indikator baik sub kegiatan, kegiatan maupun program tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Penetapan target di tahun 2025 sesuai dengan penetapan target renstra tahun 2023-2026. Secara rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024 tersaji pada tabel TC.29

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan.

Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

yang di bantu dan ditangani. Dengan didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam melaksanakan pelayanan pada PPKS, Dinas sosial memiliki 6 Program Utama yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Setiap program tersebut di atas, terdapat indikator-indikator yang mendukung pencapaian masing-masing program.

Selain itu Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah yang menangani 1 dari 6 Urusan Pelayanan Dasar, memiliki tanggung jawab dalam penerapan penyelenggaraan urusan sosial yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah kebijakan daerah terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial telah tertuang dalam KUA Tahun Anggaran berjalan. SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 sd Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel TC 30

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tugas dari Dinas Sosial, diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	- Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Bagi PSKS Belum Optimal - Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kompeksitas penanganan penyandang disabilitas anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	Belum optimalnya peran pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti social yang mendapat-kan pelayanan sosial	Kurangnya kompetensi pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial
Belum adanya regulasi yang mengatur sistem pendataan fakir miskin	Belum ada parameter pengukuran tingkat fakir miskin	Belum adanya parameter miskin kawasan perkotaan
	Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana
Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP	Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP terkendala aspek status kepemilikan tanah	Belum adanya kerjasama pemeliharaan dan pengembangan TMP antara Pemkot Salatiga dengan pemilik lahan

Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau peluang penting yang memiliki dampak besar terhadap arah, kebijakan, atau keberhasilan suatu organisasi, lembaga, atau negara dalam jangka menengah hingga panjang.

Dalam merumuskan isu strategis Dinas Sosial 2026, terlebih dahulu dengan mengidentifikasi isu strategis pembangunan regional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat daerah.

- **Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6 sebagai berikut:

Misi nomor 4 :

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi nomor 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

- **Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah**

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara

sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

- **Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga 2025-2045**

Berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, isu pembangunan daerah 20 tahun ke depan yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah: *Kesejahteraan yang Adil dan Merata*

Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

- **Isu Strategis RPJMD 2025-2029 Kota Salatiga**

Isu strategis Kota Salatiga yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan sosial adalah: Kemiskinan dan kesenjangan

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan. Angka kemiskinan di Kota Salatiga relatif kecil, namun semakin kecil angka kemiskinan maka semakin besar tantangan penurunannya. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk menjadi persoalan utama kemiskinan di Kota Salatiga. Untuk itu, perlu pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kelembagaan yang ada di Kota Salatiga, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah. Paling utama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penyediaan data kemiskinan yang update secara berkala. Validasi terhadap data kemiskinan masih sering menjadi persoalan mendasar untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu- isu penting Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Peralihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data sasaran berkaitan dengan perangkungan kesejahteraan (desil) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;

2. Minimnya pendanaan APBD sehingga memerlukan dukungan jejaring mitra dan lembaga sebagai kerangka pendanaan alternatif pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum terpenuhinya standar kompetensi PSM/Relawan Sosial yang memiliki sertifikat SDM Kesejahteraan Sosial;
4. Belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan orang terlantar.

Untuk mendukung **isu-isu tersebut diatas** dalam rangka Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistik serta Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial perlu melakukan beberapa langkah strategis berikut:

1. Updating data Fakir miskin melalui Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota untuk Masyarakat
2. Upaya pemenuhan standar kompetensi PSM/Relawan Sosial yang memiliki sertifikat SDM Kesejahteraan Sosial melalui Bimtek PSKS

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mendorong Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif

#### **2.4 Review terhadap RKPD**

Review terhadap RKPD 2026 dan keterikatannya pada renja 2026 dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Dibuat sebuah rumusan dalam perhitungan kebutuhan pada renja 2026, sehingga anggaran dan indikator yang akan dilaksanakan lebih akurat
2. Pembuatan rumusan perhitungan disusun atas dasar kebutuhan riil pada Dinas Sosial, sesuai dengan Data PPKS dan PSKS terbaru, serta menyesuaikan pada standar harga 2025
3. Secara garis besar, keseluruhan sub kegiatan yang dirumuskan pada Renstra 2026-2029 telah memuat subkegiatan yang dibutuhkan pada Renja 2026

Review terhadap RKPD disajikan pada tabel TC 31

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Setelah dilaksanakan Review terhadap Rancangan RENSTRA 2026-2029 terdapat 1 sub kegiatan yang perlu mendapatkan kajian lebih lanjut yaitu sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota Program Pemberdayaan Sosial, berkaca pada nomenklatur tersebut objek yang dibina yaitu PSKS Keluarga, namun demikian

karena objek yang dibutuhkan yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial utamanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dalam bentuk pelatihan, pelatihan dimaksud sangat dibutuhkan oleh PRSE dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi PRSE.

Selain karena permasalahan tersebut di atas, sub kegiatan tersebut juga sangat strategis dilaksanakan karena pada bidang Pemberdayaan Sosial.

Setelah proses review renstra dan identifikasi permasalahan dan keterikatannya, perlu juga diolah Kebutuhan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang bersumber dari Usulan Masyarakat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2026 telah memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, serta PPKS dan PSKS pada khususnya, juga telah memuat kebutuhan rutin pelaksanaan Operasional pada Dinas Sosial.

Proses pengusulan dari masyarakat didapatkan ketika pelaksanaan tugas harian Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan menangkap keluhan dari masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian disandingkan pada perencanaan Dinas Sosial yang tertuang dalam Renstra 2026-2029.

Pada Renja 2026 terdapat 1 usulan pokok pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pelatihan memasak bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan sudah terakomodir pada tahap penyusunan Renja.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja 2026 disajikan pada tabel TC 32

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6 sebagai berikut:

1. Misi nomor 4:

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

2. Misi nomor 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029, tujuan Dinas Sosial adalah ***Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.***

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun Sasaran Dinas Sosial adalah ***Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif***

Sedangkan Strategi dalam mewujudkan tujuan dan Saaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, dan korban bencana
2. Penguatan dan Pemberdayaan PSKS dalam Penanganan PPKS
3. Pemantapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial

Keterkaitan antara tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
<p><u>NSPK:</u></p> <p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan</p>	<p>Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan Minimal Bidang Sosial</p>	<p>Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS</p>	<p>Penguatan jaminan pemenuhan satandar pelayanan bagi PPKS kewenangan kota</p>

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)						
<u>Sasaran RPJMD:</u> Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif ekonomi		Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, korban bencana dan penguatan kelembagaan PSKS		Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merujuk pada kebutuhan organisasi serta pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Sosial

Berdasarkan pada Analisa kebutuhan dan pagu yang telah ditetapkan, Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026 ini, Dinas Sosial Kota Salatiga mengusulkan Pada Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan 6 Program, 13 kegiatan dan 37 subkegiatan dengan total pagu diperkirakan sebesar Rp. 10.471.758.000 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sementara pada Renca Kerja 2026 Dinas Sosial Kota Salatiga merencanakan 6 Program, 13 kegiatan dan 38 subkegiatan dengan total pagu diperkirakan sebesar Rp. 9.690.926.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Semilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU).

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi Renstra 2025-2029 Kota Salatiga “**Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan**”, adalah sebagai berikut:

*Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan*

Sementara Sasaran atas tujuan di atas adalah:

*Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

#### 1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Program: Persentase PSKS yang dibina

##### 1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

1.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1.1.3 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan

- 1.1.4 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 1.1.5 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
- 1.1.6 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

## 2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Program: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

- 2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - 2.1.1 Penyediaan Permakanan
  - 2.1.2 Penyediaan Alat Bantu
  - 2.1.3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - 2.1.4 Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - 2.2.1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - 2.2.2 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

## 3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Program: Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial

- 3.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.2.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.2.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

## 4) PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Program: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

4.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.1.1 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda

5) PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Indikator Program: Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan

5.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

5.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program: Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah

6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

6.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny

## 6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.7.3 Pemeliharaan Mebel

6.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Tingkat Nasional, terdapat Program yang mendukung Peran dan fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial. Program yang telah disusun mendukung

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
	penyanggah disabilitas			Penyediaan Alat Bantu
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota

Untuk mendukung keselarasan penyusunan Program pada Renja 2026 Dinas Sosial dengan RPJMD 2025-2029, disusun program prioritas yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 sebagai berikut

No	Misi	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklturnya. Terdapat enam program yang merupakan program prioritas yang mendukung visi dan misi tersebut.

Terdapat empat program yang merupakan program pendukung program unggulan Wali Kota, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi

Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana yang selaras dengan arah kebijakan Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Rincian program yang mendukung Program Unggulan Wali Kota seperti pada tabel berikut ini:

**Program Prioritas Dinas Sosial Kota Salatiga**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS	PROGRAM SEHATI (Salatiga Sehat Terlindungi)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2	Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	PROGRAM SIAKAS (Salatiga akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan sigap)	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
3		PROGRAM BIRULAH (Bangun rumah layak huni)	Program Penanganan Bencana		
4		PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarta)	Program Pemberdayaan Sosial		

Rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33 atau Tabel Rumusan Rencana Program, Jumlah Kegiatan Dan Sub Kegiatan PD Tahun Rencana dan Perkiraan Maju.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Renca Kerja 2026 Dinas Sosial Kota Salatiga merencanakan 6 Program, 13 kegiatan dan 38 subkegiatan dengan total pagu diperkirakan sebesar Rp. 9.690.926.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Semilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Salatiga lebih lengkap terdapat dalam tabel TC 33

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Renja Dinsos ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Salatiga serta penguatan peran *stakeholders* untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Selain dari pada itu, dengan disusunnya Renja Dinsos ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial pada kawasan perkotaan dengan karakteristik sub urban di Kota Salatiga memiliki muatan kompleksitas baik pada aspek kemiskinan, keterlantaran, marjinalisasi, diskriminasi dan eksploitasi. Upaya kesejahteraan sosial yang berbasis pada perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial merupakan pondasi dasar untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, urusan sosial sebagai urusan konkuren yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemenuhan hak dasar bagi setiap warga masyarakat.

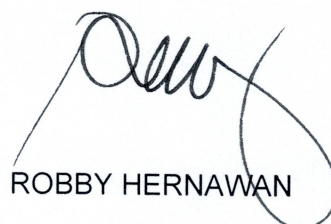
Tantangan terkini berupa transformasi pendataan sasaran layanan kesejahteraan sosial yang semula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi Pensasaran Kemiskinan Ekstrem (PKE)-BKKBN, Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek)-BPS, dan DTKS-Kementerian Sosial, pada perkembangannya berpotensi memunculkan ketidaksinkronan antara pemeringkatan kesejahteraan (desil) dengan kondisi riil di lapangan. Proses normalisasi ditempuh melalui pendataan berbasis partisipasi kelembagaan masyarakat ditingkat RT/RW/kelurahan demi menjaga nilai objektivitas dan keadilan sosial.

Kerangka pendanaan dengan fiskal terbatas ditengah tuntutan efisiensi pada semua sektor mendorong Dinas Sosial untuk semakin mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama strategis baik antar lembaga, komunitas, kelompok bahkan perorangan semata demi mendapatkan pendanaan alternatif dalam pemenuhan layanan sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama respon kasus yang bersifat kedaruratan (kontijensi) baik dikarenakan faktor keterantaran, kesakitan maupun bencana.

Sinergitas antara Dinas Sosial dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan pada aspek kualitas melalui peningkatan kompetensi berupa sertifikasi SDM kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan ke depan layanan sosial dasar dan lanjutan yang diselenggarakan bagi PPKS dapat memenuhi jaminan mutu sesuai indikator SPM.

Pada aspek regulasi, proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan tertib tuna sosial diharapkan menjadi lanskap dan legalitas pada tataran operasionalisasi penanganan sosial secara komprehensif dan tuntas (terminasi). Melalui basis regulasi yang mantap diharapkan terbangun sistem, sumberdaya personel, sarana prasarana, kerangka pendanaan, dan budaya hukum masyarakat yang memadai bagi terwujudnya Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

**Tabel TC 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan**  
**Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Kota Salatiga**  
**Dinas Sosial Kota Salatiga**

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
											8=(7/6)*100	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Urusan Sosial											
1	06	Urusan Bidang Sosial											
1	06	02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas</b>	<b>100</b>	89,36	62,5	100	160,00	81,77	81,77	100,00	
				<b>Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment</b>	<b>57,69</b>	37,04	42,3	100	236,41	50	50	100,00	
				<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	<b>85</b>	93,02	75	100	133,33	80	80	100,00	
1	06	02	2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya</b>	<b>357</b>		<b>351</b>	<b>351</b>	<b>100,00</b>			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	226	205	205	208	101,46	226	226	100,00
				Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	4	4	4	4	100,00	4	4	100,00
				Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	100	100	100	25	25,00	90	90	100,00
				Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	26	26	26	26	100,00	28	28	100,00
				Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	1				0	0		
1	06	04		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
					<b>Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</b>	<b>100</b>	100	100	100	100,00	100	100	100,00
					<b>Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</b>	<b>100</b>	100	100	100	100,00	100	100	100,00
					<b>Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti</b>	<b>100</b>	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan			
					Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100		
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100,00	100	100,00
				Penyediaan Permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	330	1310	1310	800	61,07	800	100,00
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	10	16	16	13	81,25	36	100,00
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	240	25	25	40	160,00	40	100,00
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	270	180	180	150	83,33	200	100,00
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		100	100	100,00	100	100,00
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	50						
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40	34	34	19	55,88	34	100,00
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96	96,81	95,5	96,81	101,37	100	100,00
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96	96,81	95,5	96,81	101,37	95	100,00
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	97.000	81000	81000	88200	108,89	61360	100,00
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.675	12428	12428	12689	102,10	13482	100,00
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100,00	100	100,00
					Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	100	100	100	100,00	100	100,00
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	81	81	46	56,79	84	100,00
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	1	1	1	100,00	1	100,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan						
					Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100					
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00				
1	06	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>91</b>	<b>90,47</b>	<b>89,5</b>	<b>89,7</b>	<b>100,22</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>			
1	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5	6	6	100,00	6	6	100,00		
1	06	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	46	33	36	33	91,67	33	33	100,00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	12	12	9	75,00	12	12	100,00		
1	06	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	6	7	2	28,57	8	8	100,00		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30									
1	06	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2	1	1	1	100,00	1	1	100,00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	2	2	2	100,00	2	2	100,00		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	15	20	18	90,00	17	17	100,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	40	40	38	95,00	55	55	100,00		
1	06	01	2.07	<b>Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>2</b>					12	12	100,00		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11	11	100,00	10	10	100,00		
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel						5	5	100,00		
1	06	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	12	12	1	8,33	1	1	100,00		

Kode	Usuran/Usuran Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan				
					Tahun 2024				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
1	06	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	5	35	35	100,00	35	35	100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
				Pemeliharaan Mebel	Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	4	3	0	0	0,00	4	4	0,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	3	3	100,00	2	2	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	2	2	100,00	2	2	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116	1	10	10	100,00	116	116	100,00



**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap RKPD pada Tahun 2026**

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	<b>46</b>	<b>1.312.667</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	<b>46</b>	<b>795.278</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya</b>	-	1.312.667	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya</b>	7	795.278	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	210	216.100	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	4	136.060	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kab/Kota			
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	75	629.900	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50	230.600	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	29	320.409	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	29	113.844	
						Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Salatiga	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	200	104.653	
	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Salatiga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	1	10.198	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Salatiga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	45	10.102	
						Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kota Salatiga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	90	15.500	
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	210	320.579	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	1.212.275	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	970.209	
			Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100				Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		
			Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100				Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100		
			Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100				Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	963.185	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	726.334	
	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	800	440.000,00	Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	800	434.763,00	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	36	30.071,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	36	30.071,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	250	215.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	200	225.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	285	278.114	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	150	36.500	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	249.090	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Salatiga	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	243.875	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	50	40.350	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	20	40.350	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	42	208.740	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40	203.525	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	1.650.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Salatiga	Persentase PPKS yang mendapatkan intervensi layanan sosial	70,0	705.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	96,0	1.650.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	80,0	705.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	60000	550000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	60000	305000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17.820	1.100.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13.520	400.000	
4	Program Penanganan Bencana	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	70.000	Program Penanganan Bencana	Kota Salatiga	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	66.751	
			Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	70.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100	66.751	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Mud	Kota Salatiga	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	95	70.000	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Mud	Kota Salatiga	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	75	66.751	
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>242.116</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>140.953</b>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	242.116	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Pemeliharaan taman makam pahlawan	1	140.953	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	242.116	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	140.953	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>90,5</b>	<b>#REF!</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</b>	<b>100 % 70.9 % 90.47 %</b>	<b>7.012.735</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	15.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	15.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga			4.720.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga			6.089.335	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	4.700.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	5.339.535	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	20.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	749.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga		12	60.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga		12	60.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	60.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8	60.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	281.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	254.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	65.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	65.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	23.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	23.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	4.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	4.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	7.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	7.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	123.900	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>200.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>165.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	Tersedianya Mebel	2	50.000	Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	Tersedianya Mebel	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	150.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	165.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>360.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>85.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	70.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	70.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	275.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>		<b>12</b>	<b>348.500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Salatiga</b>		<b>12</b>	<b>348.500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	150.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	35.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	35.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	9.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	9.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	36.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	36.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	18.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	18.000	

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**KOTA SALATIGA**

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Kota Salatiga	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kesejahteraannya	210 Orang	
2	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Keluarga	
	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>				
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				
3	Penyediaan Perumahan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perumahan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	800 Orang	
4	Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	36 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	150 Orang	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40 Dokumen	
	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
7	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerahn kab/kota yang di data	60000 orang	
8	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13250 orang	
	<b>Program Penanganan Bencana</b>				
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial</b>		
9	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	

Tabel T-C.33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat							
1 06 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	10Dokumen	10.000	DAU		10Dokumen	10.000
1 06 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	32 Orang/Bulan	5.339.535	DAU		32 Orang/Bulan	5.500.000
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2 Dokumen	749.800	DAU		2 Dokumen	750.000
1 06 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1 06 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	8 Dokumen	60.000	DAU		8 Dokumen	60.000
1 06 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	1 Paket	12.000	DAU		1 Paket	12.000
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	1 Paket	20.000	DAU		1 Paket	20.000
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	2 Paket	65.000	DAU		2 Paket	65.000
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	1 Psket	23.000	DAU		1 Psket	23.000
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	2 Dokumen	4.000	DAU		2 Dokumen	4.000
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	15 Laporan	7.000	DAU		15 Laporan	7.000
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	60 laporan	123.900	DAU		60 laporan	123.900
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1 06 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	0 Unit	-	DAU		0 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	Kota Salatiga	2 Unit	-	DAU		2 Unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Salatiga	2 Unit	165.000	DAU		2 Unit	165.000
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1 Laporan	15.000	DAU		1 Laporan	15.000
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	3 Laporan	70.000	DAU		3 Laporan	70.000
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	5 Unit	150.000	DAU		5 Unit	150.000
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1 Unit	35.000	DAU		1 Unit	35.000
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	3 Unit	9.000	DAU		3 Unit	9.000
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	2 Unit	36.500	DAU		2 Unit	36.500
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	2 Unit	100.000	DAU		2 Unit	100.000
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	116 Unit	18.000	DAU		116 Unit	18.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 06 02</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)</b>							
<b>1 06 02 2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kesejahteraannya	Kota Salatiga			DAU			
1 06 02 2.03 02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	Kota Salatiga			DAU			
1 06 02 2.03 03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	50 Keluarga	230.600	DAU		50 Keluarga	230.600
1 06 02 2.03 04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	29 Lembaga	113.844	DAU		29 Lembaga	113.844
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kota Salatiga	200 Orang	104.653	DAU		200 Orang	104.653
1 06 02 2.03	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	45 Orang	10.102	DAU		45 Orang	10.102
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Salatiga	90 Orang	15.500	DAU		90 Orang	15.500
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kota Salatiga	210 Orang	320579	DAU		210 Orang	320579
<b>1 06 04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>								
<b>1 06 04 2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>								
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	Kota Salatiga	800 Orang	434.763	DAU		800 Orang	434.763
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	Kota Salatiga	36 Orang	30.071	DAU		36 Orang	30.071
1 06 04 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Kota Salatiga	200 Orang	225.000	DAU		200 Orang	225.000
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Kota Salatiga	150 Orang	36.500	DAU		150 Orang	36.500
<b>1 06 04 2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>								
1 06 04 2.02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Kota Salatiga	20 orang	40.350	DAU		20 orang	40.350
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	40 dokumen	203.525	DAU		40 dokumen	203.525
<b>1 06 05</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>								
<b>1 06 05 2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	Kota Salatiga	60000 orang	305.000	DAU		60000 orang	305.000
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	13520 KPM	400.000	DAU		13520 KPM	400.000
<b>1 06 06</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>								
<b>1 06 06 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial</b>							
1 06 06 2.02 3	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Salatiga	75 orang	66.751	DAU		75 orang	66.751
<b>1 06 07</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>								
<b>1 06 07 2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemeliharaan taman makam pahlawan</b>							
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	1 makam	140.953	DAU		1 makam	140.953
					9.690.926				9.851.591



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	5.339.535.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		4.700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	749.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		20.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	60.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial	-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				8 Dokumen	60.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		60.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	254.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial	-	281.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	65.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	23.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial		23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				15 Laporan	7.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	123.900.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	70.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial		285.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	348.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial	-	348.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	150.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	35.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				3 Unit	9.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	36.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		36.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	Dinas Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	18.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	Dinas Sosial		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	-			46 %	795.278.000,00						-	0,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkembang Kapasitasnya</i>	-			7 jenis	795.278.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Keluarga	230.600.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				29 Lembaga	113.844.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan														
			<i>Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial</i>				200 Orang	104.653.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				45 Orang	10.102.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			<i>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi</i>				90 Orang	15.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				36 Orang	30.071.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PPKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				200 Orang	225.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PPKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	36.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PPKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	-			100 %	243.875.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PSKS	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Orang	40.350.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PSKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>				40 Dokumen	203.525.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	PSKS		0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b><i>Persentase PPKS yang mendapatkan intervensi layanan sosial</i></b>	-			<b>70 %</b>	<b>705.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi</i>	-			80 %	705.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				600000 Orang	305.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				13.520 Orang	400.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER , INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</i>	-			100 %	66.751.000,00						-	0,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial</i>	-			100 %	66.751.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda														
			<i>Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				75 Orang	66.751.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	masyarakat Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan</i>	-			100 %	140.953.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	-			100 %	140.953.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	TMP Dharma Kota Salatiga	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				1 Makam	140.953.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Salatiga, Tingkir, Kutowinangun Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 13 Optimalisasi program penanganan kemiskinan	TMP Dharma Kota Salatiga		0,00	DINAS SOSIAL
<b>J U M L A H</b>								<b>9.690.926.000,00</b>							<b>5.994.700.000,00</b>	

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
  2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.



↳ Kepala Dinas Sosial

dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes  
NIP. 197602042005012012

Koordinator Tim Verifikasi Bidang  
Kesejahteraan Masyarakat  
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA  
Kota Salatiga

AZIZ MUSLIM, SE, MM  
NIP. 197402172005011005

Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap  
Kebijakan Renja  
Dinas Sosial  
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.		✓	Baru akan disahkan setelah ini	

Formulir E.71  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Dinas Sosial Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sudah mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 - 2029
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Perumusan rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas kota sudah ada, namun yang mendukung provinsi dan nasional belum ada  (sudah diakomodir di bab 3.3)

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Dinas Sosial Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		2.4 review terhadap RKPD
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan;</li> <li>2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi;</li> <li>3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas;</li> <li>4. Tantangan dan peluang;</li> <li>5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan</li> </ol>	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		program dan kegiatan prioritas tahun n.			
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		Perbaiki judul sub bab, Review terhadap RKPD  Rancangan awal renja diganti menjadi renja
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		
III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029  Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		<p>rumusan program dan kegiatan;</p> <p>2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;</p> <p>3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;</p> <p>4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33</p>			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	<p>Bab ini memuat diantaranya</p> <p>1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</p> <p>3. Rencana tindak lanjut.</p>	✓		



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DINAS SOSIAL**

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319  
Faks. (0298) 3429319 Website [www.salatigakota.go.id](http://www.salatigakota.go.id)  
E-mail [dinsos@salatigakota.go.id](mailto:dinsos@salatigakota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA  
NOMOR : 900/721**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun rencana kerja perangkat daerah di Dinas Sosial Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
  15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
  19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA  
NOMOR : 900/721  
TANGGAL : 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTASALATIGA TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Sosial Kota Salatiga	Ketua
3	Ahli Muda Perencana pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
6	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Salatiga	Anggota
7	Staf Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Salatiga Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretariat Tim

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA  
NOMOR : 900/721  
TANGGAL : 1 September 2025

URAIAN TUGAS PENYUSUN  
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN  
2026

1. Pengarah
  - a. Memberikan arahan, masukan, dan saran berkaitan dengan penyusunan RENJA Tahun 2026, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen, maupun legalisasi;
  - b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun RENJA Tahun 2026.
2. Ketua
  - a. Mengkoordinasikan pekerjaan Tim Penyusun RENJA Tahun 2026;
  - b. Membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim;
  - c. Memimpin proses penyusunan RENJA Tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029;
  - d. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan RENJA Tahun 2026 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga.
3. Sekretaris
  - a. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim Penyusun RENJA Tahun 2026;
  - b. Mengelola administrasi, surat-menyurat, serta dokumentasi kegiatan penyusunan RENJA Tahun 2026;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rapat, notulen, dan laporan hasil rapat Tim;
  - d. Menghimpun dan menyusun bahan dari anggota tim untuk dirangkum menjadi dokumen RENJA Tahun 2026;
  - e. Membantu Ketua dalam menyiapkan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan RENJA Tahun 2026;
  - f. Mengarsipkan dokumen dan memastikan kelengkapan administrasi untuk legalisasi RENJA Tahun 2026.
4. Anggota
  - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025;
  - b. Melakukan analisis kinerja pelayanan OPD Dinas Sosial;

- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Sosial;
  - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2026 dan RENJA 2026;
  - e. Merumuskan tujuan, sasaran, serta program/kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029;
  - f. Merumuskan kegiatan prioritas Tahun 2026.
5. Sekretariat Tim
- a. Menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional bagi kelancaran kerja Tim Penyusun RENJA Tahun 2026;
  - b. Menyiapkan undangan, kelengkapan rapat, dan koordinasi logistik penyusunan RENJA Tahun 2026;
- 
- c. Membantu Sekretaris Tim dalam pengumpulan data, penyusunan bahan, dan dokumentasi;
  - d. Mengelola absensi, daftar hadir, serta rekapitulasi kehadiran anggota tim dalam setiap kegiatan;
  - e. Menyusun laporan administratif kegiatan rapat/tahapan penyusunan RENJA Tahun 2026;
  - f. Menjadi penghubung antara Tim Penyusun dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial terkait kebutuhan data dan informasi.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI